

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)**

MBKM pertama kali ditelurkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)<sup>39</sup>. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; serta mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar serta sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Agar perguruan tinggi dapat mengimplementasikan permendikbud tersebut, Kemendikbud menelurkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 754/P/2020 tentang 8 Indikator Kinerja Utama (IKU)<sup>40</sup>.

Salah satu IKU yang membuat perguruan tinggi memiliki dorongan supaya mahasiswanya mengikuti kegiatan MBKM adalah poin kedua, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Maksudnya, poin IKU yang didapatkan oleh perguruan tinggi akan meningkat apabila semakin banyak mahasiswanya mengikuti MBKM. Dengan begitu, perguruan tinggi mau tidak mau akan mengikuti mekanisme ini demi mendongkrak poin IKU yang berdampak pada akreditasi.

---

<sup>39</sup> Kemendikbud. *Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat untuk Mahasiswa*, 2021, 3

<sup>40</sup> Ibid Hal. 4

MBKM sebagai induk program memiliki program turunan yang dapat diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan minat mereka masing-masing<sup>41</sup>. Yang pertama adalah magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat atau disebut Magang Studi Independen Bersertifikat. Selanjutnya adalah pertukaran pelajar antar perguruan tinggi di Indonesia atau dikenal dengan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM). Selain itu, ada mengajar di sekolah atau disebut dengan Kampus Mengajar. Lalu, ada juga aktivitas kewirausahaan atau dinamakan dengan Wirausaha Merdeka. Kemudian ada juga sub-program pembangunan desa atau disebut dengan KKN Tematik. Ada juga sub-program proyek kemanusiaan atau dikenal dengan Pejuang Muda Kampus Merdeka. Dan yang terakhir ada riset/penelitian.

**Gambar 4.1** Sub-program MBKM



Sumber: Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ibid Hal. 10

<sup>42</sup> Ibid Hal. 10

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan pendidikan di era saat ini dengan konsep pembelajaran yang lebih berkari dan dinamis, sehingga dapat menciptakan inovasi dalam budaya pembelajaran untuk mahasiswa. Oleh karena itu, secara garis besar MBKM memiliki dua tujuan sebagai berikut

**Gambar 4.2** Tujuan Induk Program MBKM



Sumber: Hasil Analisa Peneliti dari Buku Panduan MBKM

## **4.2. Profil Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS)**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) berdiri berawal dari obsesi untuk itu berperan serta lebih nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahun 1980, tiga orang tokoh masyarakat Jawa Timur sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan. Ketiga tokoh tersebut adalah alm. H. Soenandar Prijo Soedarmo, yang saat itu menjabat Ketua Pertimbangan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Tingkat I Jawa Timur; Alm. Blegoh Soemarto, ketika itu sebagai Anggota Dewan

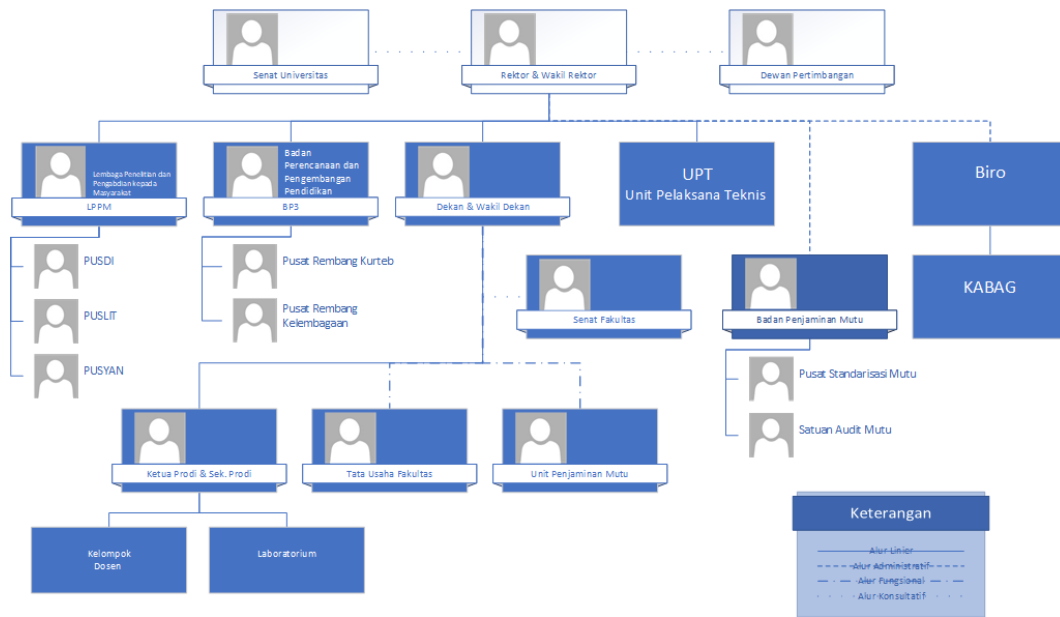
Pertimbangan DPD Golkar Daerah Tingkat I Jawa Timur; dan H. Moch. Said, yang saat itu menjabat Ketua DPD Golkar Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan didirikannya Yayasan Wijaya Kusuma yang dikukuhkan melalui Akta Notaris R. Soebiono Danoesastro, No: 256/1990, tanggal 31 Mei 1980 dan kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Soehartono, SH No: 14 Tahun 1993. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang No: 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka penataan organ maupun Anggaran Dasar Yayasan Wijaya Kusuma telah diubah berdasar undang-undang tersebut dengan dikukuhkan dalam Akta Notaris Mazwar, SH. No: 1 tanggal 9 April 2003, No. 2 tanggal 10 April 2003 dan Surat Pengesahan Yayasan Wijaya Kusuma No. C.HT.01.09.03 tanggal 2 Mei 2003, Berita Negara No. 87 tanggal 31 Oktober 2003, tambahan Berita Negara No. 107/AD/2003 dan Akta Notaris, SH. No. 3 Tahun 2007 tanggal 24 Desember 2007 dan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-Ah.01.08-866 tanggal 24 Desember 2008 serta TBN. 321/00 BN. No.21. Diperbarui Nomor AHU-AH.01.06-138 tanggal 13 Maret 2013.

Yayasan Wijaya Kusuma mendirikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dengan keputusan Badan Pengurus Yayasan No. 001/WK/VI/1981 tanggal 19 Juni 1981. Setelah mendapat ijin Operasional dari Kopertis Wilayah VII Jawa Timur No. 122/I/1981, tanggal 21 September 1981 Bapak Sapardjo selaku Sekretaris Dewan Pembina Daerah Pimpinan Pusat Golongan Karya meresmikan berdirinya UWKS saat itu meliputi 6 Fakultas, yakni Teknik, Pertanian, Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Keguruan & Ilmu Pendidikan. Pada tahun

1986 berdasarkan ijin operasional Kopertis Wilayah VII No. 582/Kop.VII/Q/1986, UWKS membuka Fakultas Kedokteran.

**Gambar 4.3** Struktur Organisasi UWKS



Sumber: Website Universitas